PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGELOLA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Akbar Ade Fitrawan
NPP. 33.0312
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: aade7785@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Ismunarta, S.Sos., M.Si
Email: ismunarta@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The fluctuating poverty situation in the Bangka Belitung Islands Province, particularly in Pangkalpinang City, demonstrates that poverty alleviation efforts still require consistent and targeted intervention. The increasing number of poor people and the rising Poverty Depth and Severity Index indicate that the poor in this region are increasingly vulnerable. Given these conditions, the Family Hope Program (PKH) is highly relevant to study, as it is one of the government's primary policies in providing social protection for low-income families.* ***Purpose:*** *This study examines the role of the Social Affairs Office in managing the Family Hope Program to reduce poverty levels in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province.* ***Method:*** *This research employs a qualitative descriptive method with a post – positivist approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving key informations such as officials from the Social Affairs Office and PKH beneficiaries. The study focuses on analyzing the role of the Social Affairs Office based on four dimentions: facilitative, educative, representational, and technical roles.* ***Results:*** *The findings indicate that the Social Affairs Office plays a strategic role in coordinating, supervising, and implementing PKH at the local lever. However, several challenges persist, including inaccurate beneficiary data, delays in fund distribution, limited assistance from program facilitators, and low public understanding of program requirement. Despite these constraints, PKH has contributed to improving access to basic service and has the potential to reduce poverty if implemented more effectively.* ***Conclusion:*** *The findings indicate that the role of the social service office in managing PKH has been fairly effective, particularly in the facilitative and educational dimensions, but improvements are still needed in the technical and coordination aspects.*

Keywords: ***Family Hope Program, Pangkalpinang, Poverty, Social Affairs Office, Social Assistance***

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Kondisi kemiskinan yang berfluktuasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkalpinang, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih memerlukan intervensi yang konsisten dan terarah. Peningkatan jumlah penduduk miskin serta meningkatnya Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa masyarakat miskin di daerah ini berada dalam situasi yang semakin rentan. Dengan melihat kondisi tersebut, PKH menjadi sangat relevan untuk dikaji karena merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan post- positivisme. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial serta penerima manfaat PKH. Analisis penelitian menggunakan teori Jim Ife yang meliputi dimensi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan PKH di tingkat daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaktepatan data penerima manfaat, keterlambatan penyaluran bantuan, kurang optimalnya pendampingan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan program. Meskipun demikian, PKH telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses layanan dasar dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan apabila dilaksanakan secara lebih optimal. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pengelolaan PKH sudah cukup baik, terutama pada dimensi fasilitatif dan edukatif, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek teknis dan koordinasi.

Kata Kunci: **Bantuan Sosial, Dinas Sosial, Kemiskinan, Pangkalpinang, Program Keluarga Harapan (PKH)**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Walaupun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi, masih terdapat banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan (Murdiyana & Mulyana, 2017). Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia meliputi rendahnya mutu pendidikan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, tingginya angka pengangguran, serta ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Barrientos dkk., 2014). Situasi ini lebih tampak di daerah pedesaan dan wilayah terpencil yang minim akses terhadap fasilitas dasar maupun kesempatan kerja. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan melibatkan berbagai pihak dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat (Handayani dkk., 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di seluruh daerah. Melalui beragam program bantuan dan pemberdayaan,

pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan pedesaan. Inisiatif tersebut ditujukan untuk meminimalkan beban masyarakat miskin, memperluas kesempatan kerja, dan memperbaiki akses terhadap layanan dasar, salah satunya adalah PKH (Program Keluarga Harapan) melalui Dinas Sosial (Erlianti dkk., 2025). PKH merupakan suatu program dengan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan anak (Sinulingga, 2026). Program ini diproyeksikan dapat menghentikan rantai kemiskinan antar generasi dengan mengembangkan kualitas SDM sejak usia dini. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan PKH penting dilakukan agar program ini semakin efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, termasuk di Kota Pangkalpinang.

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong rendah, yaitu sebesar 4,55 persen pada tahun 2024. Persentase ini jauh berada di bawah provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua yang mencapai lebih dari 26 persen, Papua Barat sekitar 20 persen, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di angka sekitar 18 persen. Bahkan bila disandingkan dengan provinsi berkategori sedang, seperti Sumatera Selatan (11,95 persen), Lampung (11,11 persen), dan Jawa Barat (7,62 persen), Bangka Belitung tetap termasuk dalam kelompok wilayah dengan kemiskinan rendah (Jalilah dkk., 2025). Namun, rendahnya persentase tersebut bukan berarti bahwa Bangka Belitung terbebas dari tantangan sosial. Data justru menunjukkan adanya dinamika dan perubahan yang cukup mencolok di beberapa daerah, khususnya di Kota Pangkalpinang yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari 4,45 persen pada tahun 2022 menjadi 5,08 persen pada tahun 2024 (Syahwanes dkk., 2025). Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti karena menunjukkan bahwa meskipun capaian kemiskinan di tingkat provinsi relatif baik, kondisi kemiskinan di level kabupaten/kota tetap menghadirkan persoalan yang membutuhkan perhatian, terutama dalam menilai sejauh mana efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan seperti PKH (Karyono, 2026).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Meskipun PKH berperan penting dalam strategi pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Salah satunya ialah ketidaksesuaian data penerima manfaat akibat kurangnya sinkronisasi antara data pusat dan daerah serta minimnya pembaruan data secara berkala, yang menyebabkan distribusi bantuan kerap tidak tepat sasaran (Sendouw et al., 2024). Selain itu, pencairan bantuan juga kerap mengalami keterlambatan akibat kendala teknis maupun logistik, yang berdampak pada efektivitas pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima (Riyadh & Dwi, 2024). Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya pendampingan intensif dari petugas PKH, sehingga penerima manfaat tidak mendapatkan arahan dan monitoring yang cukup dalam mengelola bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, maupun kesehatan (Riyadh & Dwi, 2024). Di sisi lain, keterbatasan literasi masyarakat mengenai sifat bersyarat dari PKH menyebabkan sebagian penerima belum sepenuhnya memahami tujuan program, sehingga penggunaan bantuan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan (Haliim & Purba,

2023). Berbagai permasalahan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana PKH secara nyata efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya di tingkat lokal seperti di Kota Pangkalpinang.

Berbagai studi telah meneliti tingkat efektivitas PKH dalam menanggulangi kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yumna dkk. menunjukkan bahwa PKH terbukti mampu dalam peningkatan akses Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidakakuratan data serta ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan (Yumna et al., 2024). Orang yang hidup dalam kemiskinan biasanya menghadapi banyak keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari. Pendapatan mereka sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga sebagian besar uang yang didapat hanya habis untuk makan dan kebutuhan paling mendesak. Namun demikian, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik membahas peran dan efektivitas PKH di Kota Pangkalpinang (Musliyandi dkk., 2024). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak PKH dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada level lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam literatur serta memperkuat dasar kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks Kota Pangkalpinang (Sutiyo, 2023).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan peran tersebut jika masih dirasa belum optimal dan berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Penelitian ini juga penting untuk dilakukan karena memberikan gambaran mengenai bagaimana Dinas Sosial menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis dalam mengelola PKH guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PKH, memperkuat kualitas pelayanan sosial, serta mendukung perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dirancang untuk menyajikan temuan-temuan dari tulisan-tulisan terdahulu yang telah diselesaikan oleh peneliti dan disajikan dengan cara yang mencakup argumentasi. Lebih jauh lagi, hasil-hasil tulisan yang disajikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tema tulisan yang dipilih oleh peneliti. Nurjalia dkk. (2022) mengkaji tentang efektivitas PKH dalam membantu penanggulangan kemiskinan terutama pendidikan dan kesehatan anak menggunakan teori konsep kemiskinan dengan metode kualitatif studi kasus. Riza dan Amrul (2023) membahas terkait peningkatan kesejahteraan keluarga melalui PKH menggunakan konsep kesejahteraan ekonomi Islam dengan metode kualitatif deskriptif.

Suarni dkk. (2022) menjelaskan tentang pengaruh PKH yang positif dan secara signifikan menurunkan kemiskinan menggunakan teori kemiskinan BPS dengan metode kuantitatif. Iva dan Indri (2021) menganalisis mengenai PKH yang mampu menurunkan kemiskinan serta meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan menggunakan teori lingkaran setan kemiskinan dari Ragnar Nurkse dengan metode kualitatif. Roqi dan Aris (2023) membahas terkait PKH yang efektif dalam menurunkan kemiskinan serta meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, menggunakan teori kebijakan publik dari Thomas R. Dye dan Karl Popper dengan metode kualitatif. Asriani (2021) menganalisis tentang peran Dinas Sosial dalam pengawasan, koordinasi, dan penganggaran, menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter & Van Horn dengan metode kualitatif deskriptif. Supriatna dkk. (2022) menjelaskan tentang efektivitas PKH yang secara signifikan dalam dimensi peningkatan konsumsi dan akses pendidikan anak KPM menggunakan konsep efektivitas program dengan *mixed method*.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang dapat ditinjau dari aspek teori, metode, kebijakan, dan karakteristik objek penelitian. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) yang mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam dimensi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian Nurjalia dan Ansari (2022) yang menggunakan konsep kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, penelitian Riza Pani dan Amrul Muzan (2023) yang menggunakan perspektif kesejahteraan ekonomi syariah dan Conditional Cash Transfer (CCT), penelitian Suarni, Sjarlis, dan Salim (2022) yang menggunakan teori kemiskinan BPS, serta penelitian Supriatna dkk. (2022) yang menggunakan konsep efektivitas program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai dampak atau efektivitas PKH, tetapi secara khusus menganalisis bagaimana peran kelembagaan Dinas Sosial dijalankan dalam mengelola PKH untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dari aspek metodologis, sebagian penelitian terdahulu berfokus pada pengukuran efektivitas atau pengaruh PKH terhadap kesejahteraan dan kemiskinan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed method. Misalnya, penelitian Suarni dkk. (2022) menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh PKH terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan Supriatna dkk. (2022) menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur efektivitas program. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali secara mendalam bagaimana Dinas Sosial menjalankan fungsi fasilitasi, edukasi, representasi, dan teknis dalam implementasi PKH. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses tata kelola program dibandingkan sekadar pengukuran tingkat efektivitas program.

Dari aspek kebijakan, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi PKH dalam kerangka berbagai regulasi terkini, yaitu UUD 1945 Pasal 34, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Fokus pada peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik lokal menjadi pembeda utama dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada dampak bantuan terhadap kesejahteraan penerima manfaat (Slater, 2011). Dari aspek karakteristik objek

penelitian, penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan dinamika kemiskinan yang dipengaruhi oleh sektor informal, akses layanan dasar, dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan penelitian Nurjalia dan Ansari (2022) yang dilakukan di Desa Ladang Tuha Kabupaten Aceh Selatan dengan karakteristik pedesaan, penelitian Suarni dkk. (2022) yang mencakup 40 desa di Kabupaten Barru, maupun penelitian lain yang lebih menitikberatkan pada penerima manfaat PKH secara umum. Karakteristik wilayah perkotaan menjadikan penelitian ini mampu menunjukkan bagaimana Dinas Sosial menghadapi tantangan validasi data, koordinasi antarinstansi, serta pendampingan masyarakat miskin dalam konteks urban governance.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan substantif karena tidak hanya mengidentifikasi peran Dinas Sosial, tetapi juga mengungkap keterkaitan antara peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis dengan berbagai hambatan implementasi PKH seperti ketidaktepatan data penerima manfaat, keterbatasan jumlah pendamping, keterlambatan penyaluran bantuan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program. Analisis integratif terhadap peran pemerintah daerah dan hambatan implementasi tersebut belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kontribusi Dinas Sosial dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) demi menurunkan angka kemiskinan di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi melalui pengumpulan informasi dari narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan program. Fokus penelitian berpusat pada peran Dinas Sosial menurut teori Jim Ife dan Tesoriero yang mencakup peran sebagai fasilitator, pendidik, perwakil, dan teknis (Rosliana, 2022). Narasumber penelitian diambil secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman mereka dalam pelaksanaan PKH.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan tujuan dan kebutuhan penelitian. Setelah mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan, penulis memilih informan yang dianggap mampu menyerahkan data yang relevan berdasarkan dengan kompetensi dan pengetahuan yang dimilikinya. Pemilihan teknik ini didasarkan pada keterlibatan OPD Kota Pangkalpinang serta masyarakat setempat, karena keduanya memiliki pemahaman langsung mengenai permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai instrumen utama. Peran tersebut mencakup penentuan fokus penelitian, proses pengumpulan data, hingga tahap analisis data. Sebagai instrumen pendukung, penulis memanfaatkan informan yang dipilih berdasarkan teknik pengumpulan data melalui pedoman

wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berfokus pada dua jenis triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode. Triangulasi Sumber diaplikasikan dengan membandingkan informasi mengenai peran Dinsos dan dampak PKH dari berbagai kategori informan (Kepala Dinas, Pendamping PKH, dan KPM) untuk memastikan konsistensi pemaknaan. Sementara itu, Triangulasi Metode dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara data yang diperoleh melalui Wawancara Mendalam (perspektif verbal) dengan hasil Observasi (bukti visual dan pengamatan langsung mekanisme kerja dan kondisi KPM) untuk mencapai kesimpulan yang lebih teruji dan kredibel.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman, yaitu proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Adapun tahap yang pertama adalah Pengumpulan Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan di lapangan. Data yang sudah diperoleh dari berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dikemudian dikembangkan penajaman data pada pencarian data berikutnya. Selanjutnya, tahapan reduksi data yakni penyederhanaan, pemilihan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tahap Penyajian Data dimana data yang telah direduksi dan diolah disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga peneliti dan pembaca dapat melihat pola atau makna dari data tersebut. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data sendiri dapat berupa tabel, grafik, matriks, narasi deskriptif serta peta atau sketsa. Kemudian, tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan untuk menafsirkan temuan data berdasarkan hasil wawancara atau dokumen. Kesimpulan diambil melalui data yang diperoleh pada awal hingga akhir penelitian, kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh sehingga simpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang selama tiga minggu mulai dari tanggal 5 Januari 2026-25 Januari 2026, yang mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dan mengalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menganalisis peran Dinas Sosial dalam mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Peran Dinas Sosial dalam Pengelolaan PKH

3.1.1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif Dinas Sosial dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) diwujudkan melalui upaya mempermudah masyarakat penerima manfaat dalam mengakses informasi, pelayanan, dan bantuan sosial. Dinas Sosial berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga berbagai hambatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, maupun administrasi dapat diminimalkan. Peran ini

juga terlihat melalui pembentukan kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang menjadi wadah komunikasi dan penyelesaian masalah secara bersama.

3.1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan KPH

Koordinasi dilakukan secara rutin antara Dinas Sosial, pendamping PKH, kelurahan, kecamatan, sekolah, puskesmas, dan bank penyalur bantuan. Tujuan koordinasi tersebut adalah memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran serta memantau kepatuhan KPM terhadap komponen pendidikan dan kesehatan. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat evaluasi, validasi data penerima manfaat, serta monitoring pencairan bantuan. Meskipun secara umum berjalan baik, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pembaruan data dan perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

3.1.1.2. Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Pendampingan dilakukan oleh pendamping PKH melalui kunjungan rumah, pertemuan kelompok, pendampingan pencairan bantuan, serta bantuan administrasi bagi KPM. Pendamping berperan memberikan arahan mengenai penggunaan bantuan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan penyelesaian masalah yang dihadapi penerima manfaat. Kehadiran pendamping membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam program PKH. Namun demikian, keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat menyebabkan pelayanan pendampingan belum sepenuhnya optimal.

3.1.1.3. Fasilitasi Akses Pelayanan Sosial

Dinas Sosial memfasilitasi KPM untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan penyaluran bantuan sosial. Pendamping PKH membantu masyarakat mengakses puskesmas, posyandu, sekolah, serta mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Upaya tersebut meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan oleh masyarakat. Namun, masih terdapat sebagian KPM yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memenuhi kewajiban program sehingga pemanfaatan layanan sosial belum maksimal.

3.1.2. Peran Edukasi

Peran edukatif Dinas Sosial bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai tujuan serta manfaat Program Keluarga Harapan. Melalui berbagai kegiatan edukasi, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan.

3.1.2.1. Sosialisasi Program PKH

Sosialisasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan kelompok, kegiatan P2K2, penyuluhan langsung, dan koordinasi dengan perangkat kelurahan. Materi yang disampaikan meliputi tujuan program, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban penerima manfaat, serta informasi pencairan bantuan. Kegiatan ini membantu masyarakat memahami bahwa PKH tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga merupakan instrumen peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami program secara menyeluruh.

3.1.2.2. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Dinas Sosial bersama pendamping PKH memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan anak, pemeriksaan kesehatan rutin, pencegahan stunting, pengasuhan anak, serta

pengelolaan keuangan keluarga. Melalui kegiatan P2K2, masyarakat mulai memahami bahwa bantuan PKH harus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, meskipun tingkat pemahaman antar-KPM masih berbeda-beda karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kondisi sosial masing-masing.

3.1.3. Peran Representatif

Peran representatif berkaitan dengan kemampuan Dinas Sosial dalam mewakili kepentingan masyarakat penerima manfaat serta menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan program.

3.1.3.1. Advokasi dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat

Dinas Sosial berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, maupun usulan terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan yang sering disampaikan masyarakat meliputi keterlambatan pencairan bantuan, perubahan data penerima manfaat, dan usulan masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam program. Pendamping PKH berperan sebagai perantara yang membantu menyampaikan dan menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut. Peran advokasi ini dinilai cukup baik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, walaupun beberapa penyelesaian masalah masih membutuhkan waktu yang cukup lama akibat proses verifikasi dari pemerintah pusat.

3.1.3.2. Kerjasama dengan Instansi Terkait

Dalam pelaksanaan PKH, Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pemerintah kelurahan, serta bank penyalur bantuan. Kerja sama tersebut bertujuan mendukung pemantauan pendidikan anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengurusan dokumen kependudukan, validasi data penerima manfaat, dan kelancaran pencairan bantuan. Sinergi antarinstansi ini membantu meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat keberhasilan program PKH secara keseluruhan.

3.1.4. Peran Teknis

Peran teknis merupakan peran yang berkaitan dengan aspek operasional dan administratif dalam pengelolaan PKH. Peran ini sangat penting untuk menjamin ketepatan sasaran, akurasi data, serta keberlanjutan program.

3.1.4.1. Pengelolaan dan Verifikasi Data Penerima Manfaat

Dinas Sosial melakukan pengelolaan dan verifikasi data penerima manfaat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini meliputi pendataan, validasi, verifikasi lapangan, serta pembaruan data secara berkala untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Verifikasi juga dilakukan terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Meskipun telah dilaksanakan secara rutin, masih ditemukan permasalahan berupa keterlambatan pembaruan data dan ketidaksesuaian data antara kondisi lapangan dengan data administrasi.

3.1.4.2. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PKH serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Kegiatan ini dilakukan melalui

pemantauan kepatuhan KPM terhadap komponen pendidikan dan kesehatan, evaluasi pencairan bantuan, laporan pendamping PKH, serta kunjungan lapangan. Hasil monitoring menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam melakukan perbaikan program dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pendampingan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara optimal.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang telah menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan dengan cukup baik. Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya koordinasi lintas sektor, pendampingan kepada KPM, peningkatan pemahaman masyarakat, penyaluran aspirasi, kerja sama antarinstansi, serta pengelolaan data dan evaluasi program. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam aspek pembaruan data, peningkatan jumlah pendamping, penguatan koordinasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan PKH dapat tercapai secara lebih optimal.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pangkalpinang telah menjalankan perannya dalam mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan kendala berupa ketidaktepatan data penerima manfaat, keterbatasan jumlah pendamping sosial, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan program, serta keterbatasan koordinasi dalam proses pembaruan data penerima bantuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan sosial, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sama halnya dengan temuan penelitian Nurjalia dan Ansari (2022) yang menemukan bahwa Program Keluarga Harapan berkontribusi dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga, penelitian ini juga menemukan bahwa PKH di Kota Pangkalpinang memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat miskin. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa manfaat program akan lebih optimal apabila diikuti dengan peran aktif Dinas Sosial dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Riza Pani dan Amrul Muzan (2023) yang menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, sebagian penerima manfaat PKH di Kota Pangkalpinang merasakan adanya peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga setelah menerima bantuan program. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa PKH merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang efektif dalam membantu masyarakat miskin. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya dipengaruhi oleh besaran bantuan yang diterima, tetapi juga oleh efektivitas peran Dinas Sosial dalam memberikan edukasi, pembinaan, dan motivasi kepada keluarga penerima manfaat agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi secara bertahap. Selanjutnya, temuan penelitian

ini sejalan dengan penelitian Suarni, Sjarlis, dan Salim (2022) yang menemukan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa PKH membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga berkontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat masih relevan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Namun, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dengan menekankan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan program oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Berbeda dengan temuan penelitian Supriatna dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan PKH berada pada kategori tinggi dan telah berjalan sesuai target program, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala implementasi yang menyebabkan pengelolaan PKH belum sepenuhnya optimal. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian data penerima manfaat, adanya keluarga yang seharusnya sudah graduasi tetapi masih menerima bantuan, serta keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang harus didampingi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program dapat berbeda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kondisi sosial masyarakat, serta kualitas sistem administrasi yang digunakan dalam pengelolaan program. Temuan penelitian ini juga berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada dampak PKH terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Penelitian ini justru menemukan bahwa aspek yang paling menentukan keberhasilan program adalah bagaimana Dinas Sosial menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis secara terpadu. Peran fasilitatif terlihat melalui penyediaan layanan pendampingan dan fasilitasi akses bantuan. Peran edukatif diwujudkan melalui sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan PKH. Peran representasional dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, peran teknis diwujudkan melalui pengelolaan administrasi, verifikasi data, dan monitoring pelaksanaan program. Temuan ini memperluas hasil penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada output program tanpa mengkaji secara mendalam peran kelembagaan pemerintah daerah sebagai aktor utama implementasi kebijakan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan PKH di Kota Pangkalpinang terletak pada aspek validitas data penerima manfaat. Temuan ini memperkuat berbagai penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa ketepatan sasaran bantuan merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan data tidak hanya berkaitan dengan sistem pendataan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berubah secara cepat sehingga memerlukan pembaruan data secara berkala dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial.

IV. KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial dalam mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijalankan melalui fungsi fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Pada dimensi fasilitatif,

Dinas Sosial telah optimal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai DTKS dan mekanisme yang berlaku. Pada dimensi edukatif, Dinas Sosial melalui pendamping PKH rutin memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat meskipun masih terkendala keterbatasan jumlah pendamping dan pemahaman masyarakat yang belum merata. Pada dimensi representatif, Dinas Sosial berperan menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah, namun koordinasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada dimensi teknis, Dinas Sosial melaksanakan pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi program, tetapi masih ditemukan kendala dalam akurasi dan pembaruan data serta pelaksanaan evaluasi yang belum maksimal. Dengan demikian, peran Dinas Sosial sudah berjalan cukup baik terutama pada dimensi fasilitatif dan edukatif, namun masih perlu peningkatan pada dimensi representatif dan teknis agar pelaksanaan PKH lebih optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian, mulai dari lokus penelitian yang hanya dilakukan pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbeda. Selanjutnya, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada informasi, pengalaman, dan persepsi yang disampaikan oleh para informan. Meskipun telah dilakukan triangulasi data, masih terdapat kemungkinan adanya subjektivitas dalam penyampaian maupun interpretasi informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Selain itu, keterbatasan waktu dan biaya penelitian juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan kembali penelitian lanjutan pada lokus serupa yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam mengelola KPH untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang sehingga didapatkan hasil yang lebih rinci dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Erlianti, D., Handoko, V. R., Sukristyanto, A., & Saputra, T. (2025). *Recalibrating social protection: Insights from implementation of Indonesia's Family Hope Program (PKH). Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 23*(11), 354–363. https://doi.org/10.52152/801826

Fiszbien, A., Kanbur, R., Yemtsov, R. (2014). *Social protection and poverty reduction: Global patterns and some targets*. *World Development, 61*, 167-177. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.04.010

Haliim, W., & Purba, D. (2023). *Social and bureaucratic problems in social policy implementation in Indonesia: A study on the PKH*. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(1), 105–129. https://www.researchgate.net/publication/392090413_SOCIAL_AND_BUREAUCRATIC_PROBLEMS_IN_SOCIAL_POLICY_IMPLEMENTATION_IN_INDONESIA_A_STUDY_ON_THE_PROGRAM_KELUARGA_HARAPAN_PKH

Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangunsong, F. (2022). *Collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, East Java Province*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13*(1). https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329 https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533

Jalilah, J., Maimun, M., & Nashrullah, N. (2025). *Implementasi PKH dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis, 3(2), 34–53. https://journal.ar-raniry.ac.id/JIBES/article/view/6601

Karyono, A. (2026). *Indonesia's Program Keluarga Harapan (2007–2024): Social investment aspirations, political instrumentalisation, and contested developmental outcomes. Cogent Social Sciences, 12*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2663682

Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). *Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 10*(1). https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384

Musliyandi, M., Hasanuddin, H., & Saeri, M. (2024). *Implementasi Kebijakan PKH dalam Menangani Masalah Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021*. Innovative**:** Journal Of Social Science Research, 4(4), 5335–5346. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13724

Riyadh, A., & Dwi, A. P. Y. (2024). *Implementasi Program Keluarga Harapan: Menuju Kesejahteraan Keluarga Indonesia*. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1362

Rosliana, R. (2022). *Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan*. *Jurnal Pallangga Praja, 5*(1). https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3432

Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* IPDN Press.

Sinulingga, A. (2026). *Beyond imitation: Adaptive policy transfer in Indonesia's conditional cash transfer. Journal of International and Comparative Social Policy.* https://doi.org/10.1177/14680181261425188

Slater, R. (2011). *Cash transfers, social protection and poverty reduction*. *International Journal of Social Welfare, 20*(3), 250-259. https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00801.x

Sutiyo, S. (2023). *A neo-institutional analysis of social protection: Insights from Indonesia*. *Global Social Policy, 23*(2), 268-285 https://doi.org/10.1177/14680181221144559

Syahwanes, A. C., Saepudin, E. A., Madina, L. U., Azzahra, S., & Muslimah, I. (2025). *Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin*. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 176–183. https://doi.org/10.63822/j6s5v471